

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dalam implementasi tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur. Hal ini sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, dalam salah satu pasalnya, mengatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan Negara meliputi kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Karenanya prinsip akuntabilitas mengharuskan dalam setiap kegiatan dan hasil akhirnya harus dipertanggung jawabkan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah, bahwa tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dengan **Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi** di bawah ini :

#### **1.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi**

##### **1.1.1. Tugas Pokok :**

Sesuai dengan Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah, bahwa tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

##### **1.1.2. Fungsi :**

Untuk dapat melaksanakan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik harus didukung oleh sumber daya yang memadai dan secara integratif dapat diarahkan kepada pencapaian sasaran yang memungkinkan terlaksananya peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## I.2 Data Kepegawaian

Jumlah Pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah kondisi 31 Desember 2022 adalah sebanyak 22 (dua puluh dua) orang sebagaimana dapat dijabarkan dalam tabel data pegawai berikut:

**Tabel 1.1**  
**REGISTER PEGAWAI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**Keadaan : 31 Desember 2022**

N O	NAMA	L / P	Gol	Esel on	JABATAN	Pendidikan Terakhir	DIKLAT PIM yang telah diikuti	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Murdi, AP, M.Si	L	IV/b	IIb	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	S-2 Ilmu Politik	ADUM	
2	Masujiadi, SH	L	IV/a	IIIa	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	S-1 Ilmu Hukum	Diklatpim IV	
3	H. Amirudin Nur, SE	L	IV/a	IIIb	Kepala Bidang Pembinaan Politik	S-1 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan	Diklatpim IV	
4	Herwin Ahwanudin, SH	L	IV/a	IIIb	Kepala Bidang Pembinaan Ketahanan Bangsa	S-1 Ilmu Hukum	Diklatpim IV	
5	Fero Ramdhoni, S.IP	L	III/a	IIIb	Kepala Bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa	S-1 Ilmu Pemerintahan	Diklatpim IV	
6	Lalu Abdul Khalik, S.Sos	L	III/d		Analisis Kebijakan Ahli Muda	S-1 Ilmu Administrasi Negara	Diklatpim IV	
7	M. Sabri, S.Sos	L	III/d		Analisis Kebijakan Ahli Muda	S-1 Ilmu Administrasi Negara	Diklatpim IV	
8	Sri Hidayati, SE	P	III/d		Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	S-1 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan	Diklatpim IV	
9	Suhartono, S.IP	L	III/c	IVa	Kasubbag Umum, Kepegawaian & Keuangan	S-1 Ilmu Pemerintahan	Diklatpim IV	
10	Samsurriyadi, S.Sos	L	III/c		Analisis Kebijakan Ahli Muda	S-1 Ilmu Administrasi Negara		
11	Baiq Damar Asri, SE	P	III/b		Analisis Kebijakan Ahli Muda	S-1 Ilmu Ekonomi dan		

						Studi Pembangunan		
12	Ahmad Hanapi, S.IP	L	III/c		Pelaksana pada Bidang Pembinaan Politik dan Ormas	S-1 Ilmu Pemerintahan		
13	Hassugian Putra Kusuma, A.Md.T	L	III/b		Pelaksana pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	D-III Teknik		
14	Lalu Wiragune, S.Adm	L	III/b		Pelaksana pada Bidang Pembinaan Politik dan Ormas	S-1 Ilmu Administrasi Negara		
15	Lalu Alfian, SH	L	III/a		Pelaksana pada Bidang Ideologi, Wawasan dan Kesatuan Bangsa	S-1 Ilmu Hukum		
16	Monica Christine Batubara, SE	P	III/a		Pelaksana pada Sub Bagian Umum, Kepegawaian & Keuangan	S-1 Akuntansi		
17	Juwaini	L	II/d		Pelaksana pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	SLTA – Madrasah Aliyah		
18	Hani Fitriati	P	II/d		Pelaksana pada Sub Bagian Umum, Kepegawaian & Keuangan	SLTA – IPS		
19	Haerul Muchson	L	II/c		Pelaksana pada Sub Bagian Umum, Kepegawaian & Keuangan	SLTA - Bahasa		
20	Fanny Yulia Ramadhani	P	II/d		Pelaksana pada Bidang Pembinaan Politik dan Ormas	SLTA - Biologi		
21	Lalu Muhammad Saleh	L	II/d		Pelaksana pada Bidang Ideologi, Wawasan dan Kesatuan Bangsa	SLTA - Bahasa		
22	H. Nasri	L	II/a		Pelaksana pada Sub Bagian Umum, Kepegawaian & Keuangan	SD – Paket C		

Berdasarkan tabel kualifikasi pegawai diatas, SDM/Aparatur yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah dianggap memiliki kapasitas dari aspek tingkat pendidikan, sementara aspek pengetahuan dan keterampilan masih perlu peningkatan.

### **I.3 Struktur Organisasi**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah yang tercantum dalam Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah tersebut di atas, maka susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagaimana dilihat pada gambar di bawah ini :

**Gambar 1.1**

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH NOMOR 98 TAHUN 2021**

<b>KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	<b>14</b>
MURDI, AP., M.Si	

<b>SEKRETARIS BADAN</b>	<b>12</b>
MASUJIADI, SH.	

<b>KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN</b>	<b>9</b>
SUHARTONO, S.IP	

<b>JABATAN PELAKSANA</b>	
HAERUL MUCHSON	6
MONIKA CHRISTINE BATUBARA, SE.	7
HANI FITRIATI	6
H. NASRI	1

<b>ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA</b>	<b>9</b>
SRI HIDAYATI, SE	

<b>BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK</b>	<b>11</b>
LALU HERWIN AKHWANUDIN, SH.	

<b>ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA</b>	<b>9</b>
<b>PELAKSANA</b>	
HASSUGIAN PUTRA KUSUMA, A.MdT	5
JUWAINI	5

<b>BIDANG POLITIK DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>11</b>
H. AMIRUDIN NUR, SE.	

<b>ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA</b>	<b>9</b>
M. SABRI, S.Sos.	
SYAMSURIADI, S.Sos.	
<b>PELAKSANA</b>	
AHMAD HANAPI, S.IP	5
LALU WIREGUNE, S.Adm.	5
FANNY YULIA RAMADHANI	5

<b>IDEOLOGI, WAWASAN DAN KETAHANAN BANGSA</b>	<b>11</b>
FERO RAMDHONI, S.IP	

<b>ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA</b>	<b>9</b>
LALU ABDUL KHALIK, S.Sos.	
BAIQ DAMAR, SE.	
<b>PELAKSANA</b>	
LALU ALFAN, SH.	5
LALU MUHAMAD SALEH	5

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### II.1 Rencana Strategis SKPD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan tupoksinya, mengambil fokus dalam membantu arah kebijakan yang di susun Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih pada **Misi ke-1** yaitu : "Merawat Ahlaqul Karimah dalam kehidupan bermasyarakat". Misi pertama ini mempunyai tujuan terwujudnya nilai-nilai luhur mental dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat, yang dapat diwujudkan dengan pencapaian sasaran: (1) Meningkatnya stabilitas sosial masyarakat dan (2) Meningkatnya moderasi beragama. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah ditugaskan untuk membantu tercapainya tujuan Kepala Daerah yang berfokus pada pencapaian sasaran Misi 1 baik pada sasaran 1 dan sasaran 2 yaitu "Meningkatnya Stabilitas Sosial Masyarakat" dan "Meningkatnya Moderasi Beragama". Dimana hal tersebut akan dituangkan pada "Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial" serta "Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya". Salah satu kegiatan yang dilakukan yaitu peningkatan peran lembaga mediasi desa dalam penyelesaian konflik sosial, dengan cara Bale Mediasi Kabupaten yang akan menjadi media penyelesaian konflik perdata maupun pidana ringan di tengah masyarakat baik dari tingkat desa sampai kabupaten. Dimana Bale Mediasi akan beranggotakan Tokoh-tokoh Agama dan tenaga-tenaga ahli sebagai mediator di tengah masyarakat, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi Sekretariat Bale Mediasi Kabupaten Lombok Tengah. Sedangkan dalam mencapai sasaran ke 2 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berperan dalam pembinaan dan koordinasi dengan Forum kerukunan Beragama atau FKUB.

#### TUJUAN

Tujuan merupakan implementasi dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah dalam kurun tahun 2021–2026 menetapkan 2 (dua) tujuan yaitu **"TERWUJUDNYA NILAI-NILAI SPIRITUAL DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT"** dan **"TERWUJUDNYA NILAI-NILAI LUHUR MENTAL DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT."**

## SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya masing-masing). Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah dalam kurun waktu tahun 2021-2026 menetapkan sasaran **“Meningkatnya Kohesifitas Sosial”** dan **“Meningkatnya Stabilitas Politik”**.

Pernyataan tujuan dan sasaran strategis jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah beserta indikator kinerjanya dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

### RENCANA STRATEGIS

#### TAHUN 2021 S.D. 2026

Instansi: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Keterangan
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6
1. Terwujudnya nilai-nilai luhur mental dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat	Meningkatnya Kohesifitas Sosial	Indeks Kerukunan	1. Melaksanakan dialog antar tokoh agama dan tokoh masyarakat dengan pemerintah membahas kondisi kerukunan antar umat beragama	1. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	
			2. Menjalin hubungan yang baik dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat kerukunan antar umat beragama		
			1. Melaksanakan kegiatan pemantapan wawasan kebangsaan sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara	1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	

			1. Menjalin hubungan yang harmonis dengan LSM/Ormas dan Parpol	1. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
			1. Kerjasama dengan aparat penegak hukum, tokoh agama/tokoh masyarakat, tokoh adat dan budaya	1. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	
	Meningkatnya Stabilitas Politik	Indeks Demokrasi	1. Meningkatkan sosialisasi kepada Masyarakat 2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam meningkatkan iklim politik yang kondusif	1. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	

## II.2 Rencana Kerja Tahunan

### RENCANA KERJA TAHUNAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

SKPD : (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)

Tahun: (2022)

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
1. Meningkatnya Kohesifitas Sosial	Indeks Kerukunan	67,22
2. Meningkatnya Stabilitas Politik	Indeks Demokrasi	67,22

### II.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

#### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	KONDISI AWAL (2020)	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
							1	2	3	4	5	
1	Terwujudnya nilai-nilai luhur mental dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat  - Meningkatnya stabilitas sosial	1. Indeks Kerukunan	<i>Diukur menggunakan statistik inferensial dengan teknik analisis Structural Equation Modeling (SEM) pada skala :</i>  0 - 2 = Sangat Rendah 21 - 40 = Rendah 41 - 60 = Sedang 61 - 80 = Tinggi	Survey	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	67,12	67,12	67,22	67,32	67,42	67,52	67,52
		2. Indeks Demokrasi	<i>Metode penghitungan Indeks Demokrasi menggunakan triangulasi, yakni mengkombinasikan antara metode penelusuran kuantitatif dan kualitatif, dengan rancangan tertentu sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi (cross validate) data yang didapat dengan metode yang lain, pada skala :</i>  0 - 2 = Sangat Rendah 21 - 40 = Rendah 41 - 60 = Sedang 61 - 80 = Tinggi 81 - 100 = Sangat Tinggi	Survey	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	67,12	67,12	67,22	67,32	67,42	67,52	67,52

#### DEFINISI OPERASIONAL (DO)

ASPEK	VARIABEL		INDIKATOR									
KEBEBASAN SIPIL	1	Kebebasan berkumpul dan berserikat	1	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berserikat dan berkumpul								
			2	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh yang menghambat kebebasan berserikat dan berkumpul								
	2	Kebebasan berpendapat	3	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat								
			4	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh yang menghambat kebebasan berpendapat								
	3	Kebebasan berkeyakinan	5	Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan ajaran agamanya								
			6	Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan ajaran agamanya								
			7	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lainnya terkait dengan ajaran agama								
	4	Kebebasan dari diskriminasi	8	Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau kelompok rentan lainnya								
			9	Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau kelompok rentan lainnya								
			10	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh kelompok masyarakat karena alasan gender, etnis, atau kelompok rentan lainnya								
HAK-HAK POLITIK	5	Hak memilih dan dipilih	11	Kejadian dimana hak memilih dan dipilih masyarakat terhambat								
			12	Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih								
			13	Kualitas daftar pemilih tetap (DPT)								
			14	Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih ( <i>Voters turnout</i> )								
			15	Persentase perempuan di keanggotaan DPRD								
6	Partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan	16	Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan									
		17	Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan									
LEMBAGA DEMOKRASI	7	PEMILU/Pemilihan yang bebas dan JURDIL	18	Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan PEMILU/Pemilihan								
			19	Kejadian atau pelaporan kecurangan dalam penghitungan suara								
	8	Peran DPRD	20	Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan dalam APBD								
			21	Persentase jumlah PERDA yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total PERDA yang dihasilkan								
			22	Rekomendasi DPRD terhadap Eksekutif								
	9	Peran Partai Politik	23	Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai politik								
			24	Persentase perempuan dalam kepengurusan partai politik								
	10	Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	25	Jumlah kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh PTUN								
			26	Upaya penyediaan informasi APBD								
	11	Peradilan yang independen	27	Keputusan Hakim yang kontroversial								
			28	Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh Jaksa dan/atau Polisi								

## II.4 Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **Murdi, AP, M.Si**

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : **H. Lalu Pathul Bahri, S.IP**

Jabatan : Bupati Lombok Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama akan berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak ke dua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

**H. Lalu Pathul Bahri, S.IP**

Praya, Januari 2022

Pihak Pertama,

**Murdi, AP, M.Si**

NIP. 197512311994121002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kohesifitas Sosial	Indeks Kerukunan	67,22
2	Meningkatnya Stabilitas Politik	Indeks Demokrasi	67,22

Belanja Daerah	Anggaran	Keterangan
1. Belanja Operasi	Rp. 5,765,431,168	APBD
2. Belanja Modal	Rp. 35,614,514	APBD

Praya, Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



**H. Lalu Pathul Bahri, S.IP**



**Murdi, AP, M.Si**

NIP. 197512311994121002

**RENCANA SASARAN KINERJA PEGAWAI**

OPD : Bakesbangpol

PERIODE PENILAIAN : JANUARI S.D DESEMBER TAHUN 2022

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Murdi, AP,M.Si	NAMA	H. Lalu Pathul Bahri, S.IP
NIP	197512311994121002	NIP	-
PANGKAT/GOL RUANG	Pembina Tk.I/IVb	PANGKAT/GOL RUANG	Bupati Lombok Tengah
JABATAN	Kepala Badan	JABATAN	
INSTANSI	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	INSTANSI	-
NO	RENCANA KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A. KINERJA UTAMA</b>			
	Meningkatnya Kohesifitas Sosial	Indeks Kerukunan	67,22
	Meningkatnya Stabilitas Politik	Indeks Demokrasi	67,22
	Terlaksananya Direktif Pimpinan Sesuai target Waktu yang ditetapkan	Persentase Penyelesaian Penugasan / Direktif Pimpinan Sesuai Target Waktu yang Ditetapkan	100 %
<b>B. KINERJA TAMBAHAN</b>			

Praya , 2 Januari 2023

Pejabat yang dinilai,



( Murdi, AP,M.Si )

Pejabat Penilai Kinerja,



( H. Lalu Pathul Bahri, S.IP )

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### III.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase pencapaian Rencana tingkat pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan sasaran skala ordinal sebagai berikut:

No	Capaian Kinerja	Keterangan
1.	Nilai > 100	SANGAT BAIK
2.	Nilai 86 s/d100	BAIK
3.	Nilai 71 s/d<85	SEDANG
4.	Nilai 56 s/d<70	KURANG
5.	Nilai <55	SANGAT KURANG

#### III.2 Evaluasi Pencapaian Kinerja Sasaran

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran OPD. Tolok ukur keberhasilan dari sasaran adalah dengan indikator kinerja sebagaimana tertuang pada perjanjian kinerja Kepala OPD. Adapun capaian kinerja sasaran tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Sasaran No. 1** “Meningkatnya Kohesifitas Sosial”

Sasaran No. 1 tersebut diukur dengan Nilai 86 s/d 100 dengan indikator kinerja sasaran yaitu :

1. Indeks Kerukunan

Capaian indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran No.1 Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi Tahun sebelumnya			Target awal renstra 2023	Sumber Data
						2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Indeks Kerukunan	Poin	67,22	100	100%	100	100	100	100	Dokumentasi, Laporan
RATA-RATA					100%	KRITERIA Tahun 2022: BAIK				

Indikator sasaran 1 yaitu “Indeks Kerukunan ” diukur dengan rumus “Diukur menggunakan statistik inferensial dengan teknik analisis Structural Equation Modeling (SEM) pada skala :

0	-	20	= Sangat Rendah
21	-	40	= Rendah
41	-	60	= Sedang
61	-	80	= Tinggi

dengan sumber data dari hasil survey didukung dengan 3 (tiga) program yaitu:

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan indikator program yaitu “Persentase Desa yang Mencanangkan Desa Bebas Narkoba dimana Program dan kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Ideologi, Wawasan dan Ketahanan Bangsa pada tahun 2022 ini dapat dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditetapkan dengan realisasi hasil kinerja yang sesuai dengan target yang diharapkan, yaitu realisasi kinerja 100%.

Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Ideologi, Wawasan dan Ketahanan Bangsa antara lain diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 1.1

Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Ideologi, Wawasan dan Ketahanan Bangsa  
Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Tercapai/ Tidak	Persentase (%)	Target Akhir Renstra
1.	Persentase Desa yang mencanangkan Desa Bebas Narkoba	38,46 %	38,46 %	Tercapai	100	69,23 %

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Ideologi Negara dan Wawasan Kebangsaan (IWKB) antara lain :

1. Sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN – PN) dalam rangka Pembentukan Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) yang diselenggarakan pada tanggal 9 Februari 2022



2. Pelatihan Pra Tugas Fasilitator Desa/Kelurahan Bersih Narkoba (BERSINAR) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2022



3. Pelatihan Pengorganisasian Fasilitator Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) Angkatan I yang dilaksanakan dari tanggal 28 s/d 30 Desember 2022





2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan 1 (satu) indikator program yaitu “Persentase pembinaan ideologi dan karakter kebangsaan pada wilayah rawan konflik”, dimana Program dan kegiatan–kegiatan Bidang Ideologi, Wawasan dan Ketahanan Bangsa pada tahun 2022 ini dapat dilaksanakan

sesuai waktu yang telah ditetapkan dengan realisasi hasil kinerja yang sesuai dengan target yang diharapkan, yaitu realisasi kinerja 100%.

Evaluasi capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Bidang Ideologi, Wawasan dan Ketahanan Bangsa antara lain diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Ideologi, Wawasan dan Ketahanan Bangsa**  
**Tahun 2022**

No.	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Tercapai/ Tidak	Persentase (%)	Target Akhir Renstra
1.	Persentase pembinaan ideologi dan karakter kebangsaan pada wilayah rawan konflik	100 %	100 %	Tercapai	100	100 %

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Ideologi Negara dan Wawasan Kebangsaan (IWK) antara lain :

1. Sosialisasi Pembauran Kebangsaan Bersama FKUB dan Pemuda Pemudi Lintas Agama di Lombok Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2022





2. Penerimaan Kunjungan Kerja FKUB Kabupaten Malang Jawa Timur



3. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial dengan 1 (satu) indikator program yaitu “Persentase Penyelesaian Konflik Sosial”, dimana Program dan kegiatan–kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada tahun 2022 ini dapat dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditetapkan dengan realisasi hasil kinerja yang sesuai dengan target yang diharapkan, yaitu realisasi kinerja 100%.

Evaluasi capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik antara lain diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.4**  
**Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Tahun 2022**

No.	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Tercapai/ Tidak	Persentase (%)	Target Akhir Renstra
1.	Persentase Penyelesaian Konflik Sosial	100 %	100 %	Tercapai	100	100 %

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik antara lain :

1. Tim Satuan Pengumpul Keterangan/Informan





2. Bale Mediasi



3. Pengawasan Penyampaian Pendapat di Muka Umum

4. Pengawasan Penerimaan Hearing/demo dalam rangka Aksi Aliansi Kemanusiaan terkait isu kematian Balita akibat telat penanganan di Kab. Lombok Tengah



5. Pemantauan Demo Menolak Kenaikan Harga BBM



6. Monitoring aksi demo Masyarakat terkait Proyek Pariwisata di Lombok Tengah yang tidak ada kejelasan



4. TKDPD (Tim Kewaspadaan Dini dan Pencegahan Dini)



7. Penyelesaian Konflik Antara BKD dan Kepala Desa Beleka



8. Penyelesaian Konflik Antara Dusun Lingkok Bunut Desa Lekor Kec. Janapria Kab. Loteng Dengan Dusun Serangin Desa Sukaraja Kab. Lombok Timur



9. Penyelesaian Konflik Warga Montong Sapah yang di picu SARA



5. Fasilitasi FORKOPIMDA (Forum Koordinasi Pemerintah Daerah)





**Sasaran No. 2 “Meningkatnya Stabilitas Politik”**

Sasaran No. 2 tersebut diukur dengan Nilai 86 s/d 100 dengan indikator kinerja sasaran yaitu :

1. Indeks Demokrasi

Capaian indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2**  
**Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran No.2 Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi Tahun sebelumnya			Target awal renstra 2023	Sumber Data
						2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Indeks Demokrasi	Poin	67,32		100%					Dokumen tasi, Laporan
RATA-RATA					100%	KRITERIA Tahun 2022: BAIK				

Indikator Sasaran 2 yaitu “Indeks Demokrasi” diukur dengan rumus Metode penghitungan Indeks Demokrasi menggunakan triangulasi, yakni mengkombinasikan antara metode penelusuran kuantitatif dan kualitatif, dengan rancangan tertentu sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi (cross validate) data yang didapat dengan metode yang lain, pada skala :

0	-	20	= Sangat Rendah
21	-	40	= Rendah
41	-	60	= Sedang
61	-	80	= Tinggi
81	-	100	= Sangat Tinggi

dengan sumber data berasal dari survey dimana didukung dengan 2 (dua) program yaitu:

1. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan pengembangan Etika serta Budaya Politik dengan 3 (tiga) indikator program

Indikator program ke 1 yaitu “angka partisipasi pemilih dalam PEMILU”, indikator program ke 2 yaitu “Persentase PARPOL yang melaksanakan fungsi kaderisasi” sedangkan indikator program ke 3 yaitu “Persentase elemen masyarakat yang mendapat pendidikan politik “ dimana Program dan kegiatan–kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Politik dan Ormas pada tahun 2022 ini dapat dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditetapkan dengan realisasi hasil kinerja yang sesuai dengan target yang diharapkan, yaitu realisasi kinerja 100%.

Evaluasi capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Bidang Politik dan Ormas antara lain diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Politik dan Ormas Tahun 2022**

No.	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Tercapai/ Tidak	Persentase (%)	Target Akhir Renstra
1.	Angka Partisipasi Pemilih dalam PEMILU	0	0	Tidak terukur dikarenakan tidak ada PEMILU dalam Tahun berjalan	0	0
2.	Persentase PARPOL yang Melaksanakan Fungsi Kaderisasi	100 %	100 %	Tercapai	100	100 %
3.	Persentase elemen masyarakat yang mendapat pendidikan politik	40 %	60 %	Tercapai	150	65 %

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Politik dan Ormas (POLORMAS) antara lain :

1. Pelatihan/Sosialisasi Kepada Pengurus Parpol Penerima Dana Hibah



## 2. Sosialisasi Pemilih Pemula Pemilu 2024 (Lomba Konten Kreatif Pemilih Pemula)

**LOMBA KONTEN KREATIF 2024**  
PEMILIH PEMULA PEMILU

**FREE REGISTRASI**

**Timeline**

Tanggal	Kegiatan
24 Okt - 20 Nov 2022	Pendaftaran
01 Nov - 20 Nov 2022	Pembinaan
28 November 2022	Pengumuman Peringkat

**TOTAL HADIAH Rp. 16.650.000**

**Pilihan Lomba**  
- Video Kreatif  
- Konten Video Berisi Ajakan Yang Di Buat Se-Kreatif Mungkin Untuk Menggunakan Hak Pilih Pada Pemilu 2024 Bagi Pemilih Pemula Dengan Nara: Lawan Hoax Pada Pemilu, Anti Sara, Anti Politik Uang dan Anti Golput.

**Ketentuan Lomba**  
- Durasi Video maksimal 2 Menit.  
- Follow semua Akun Sosial Bakesbangpol Lampung Tengah.  
- Video Merupakan Karya Individu/Kelompok Yang Belum Pernah Di Luncurkan Sebelumnya dan Dapat Mengirim Lebih Dari 1 Video.  
- Upload Konten Pada Akun Youtube, Facebook, Instagram, Twitter, dan Tiktok Akun Sosial Bakesbangpol Lampung.

**CONTACT PERSON**  
087805987718

**FORMULIR PENDAFTARAN DAPAT DI UNDUH PADA :** <http://bit.ly/3CHg1An>

Bakesbangpol Lampung



### 3. Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik



### 2. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan 2 (dua) indikator program

Indikator program ke 1 yaitu “Persentase ormas yang aktif dalam manajemen administrasi”, sedangkan indikator program ke 2 yaitu “Persentase Ormas Yang Bermitra dengan Pemerintah & Dunia Usaha” dimana Program dan kegiatan-kegiatan Bidang Politik dan Ormas pada tahun 2022 ini dapat dilaksanakan sesuai waktu yang telah

ditetapkan dengan realisasi hasil kinerja yang sesuai dengan target yang diharapkan, yaitu realisasi kinerja 100%.

Evaluasi capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Bidang Politik dan Ormas antara lain diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.2**  
**Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Politik dan Ormas Tahun 2022**

No.	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Tercapai/ Tidak	Persentase (%)	Target Akhir Renstra
1.	Persentase Ormas yang Aktif dalam Manajemen Administrasi	89 %	89,02 %	Tercapai	100	93 %

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Politik dan Ormas (POLORMAS) antara lain :

1. Penyusunan Naskah Akademik Ranperda Pembinaan Ormas





2. Dialog Publik Ormas dan Orpol (Online dan Offline) dan Pemberian Dana Hibah Ormas







### III. 3 Evaluasi Pencapaian Kinerja pencapaian Tujuan Strategis OPD Tahun 2022

Pencapaian kinerja tujuan strategis yang diraih Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada dasarnya merupakan akumulasi dan pencapaian seluruh sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Secara lebih rinci tingkat pencapaian tujuan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 dipaparkan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Tingkat Pencapaian Tujuan Strategis**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022**

TUJUAN		RATA-RATA CAPAIAN SASARAN		KRITERIA CAPAIAN SASARAN	RATA-RATA CAPAIAN TUJUAN	KRITERIA PENCAPAIAN TUJUAN	RATA-RATA CAPAIAN TUJUAN TAHUN SEBELUMNYA (2015)
1	Terwujudnya Nilai-Nilai Spiritual Dalam Kehidupan Bermasyarakat	1	Meningkatnya Kohesifitas Sosial	Baik	100%	Baik	100%
2	Terwujudnya Nilai-Nilai Luhur Mental Dalam Kehidupan Bermasyarakat	2	Meningkatnya Stabilitas Politik	Baik	100%	Baik	100%
Rata-rata Total			100%	Baik	100%	Baik	

### III.4 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat diketahui dari aspek anggaran dan realisasi belanja tahun 2022 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel 1

**Anggaran dan realisasi dari pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

No	Program dan Kegiatan yang dilaksanakan	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung			Total Belanja	Realisasi Belanja	Per sen tase (%)	Unit kerja yang melaksanakan program/kegiatan (Sekretariat/ Bidang/Bagian/ Seksi)
			Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal				
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>									
1.	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2,694,341		2,694,341	2,694,341	100	Sekretariat
2.	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD			2,225,148		2,225,148	2,225,148	100	Sekretariat
3.	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD			1,441,660		1,441,660	1,441,660	100	Sekretariat
4.	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD			2,320.292		2.320.292	2.320.292	100	Sekretariat
5.	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA - SKPD			1.337.457		1.337.457	1.337.457	100	Sekretariat
6.	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			2.186.131		2.186.131	2.186.131	100	Sekretariat
7.	Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2.482.841.157			2.482.841.157	2,370,166,883	95,46	Sekretariat
8.	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			2.045.343		2.045.343	2.045.343	100	Sekretariat
9.	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD			12.670.647		12.670.647	12.670.647	100	Sekretariat

10.	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2.810.829	35.614.514	38.425.343	38.425.343	100	Sekretariat
11.	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor			12.684.000		12.684.000	12.684.000	100	Sekretariat
12.	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan			4.440.000		4.440.000	4.440.000	100	Sekretariat
13.	Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			57.168.000		57.168.000	51,404,896	89,92	Sekretariat
14.	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			33.461.829		33.461.829	31,998,951	95,63	Sekretariat
15.	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			76.644.000		76.644.000	72,069,290	94,03	Sekretariat

**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**

1.	Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			1.979.678		1.979.678	1.979.678	100	Bidang Ideologi, Wawasan dan Ketahanan Bangsa
2.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Tekhnis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			1.139.446		1.139.446	1.139.446	100	Bidang Ideologi, Wawasan dan Ketahanan Bangsa
3.	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter			28.953.107		28.953.107	28.953.107	100	Bidang Ideologi, Wawasan dan Ketahanan Bangsa

	Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan								
4.	Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			15.998.484		15.998.484	15,632,937	97,72	Bidang Ideologi, Wawasan dan Ketahanan Bangsa
5.	Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			6.456.484		6.456.484	5,656,484	87,61	Bidang Ideologi, Wawasan dan Ketahanan Bangsa

**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**

1.	Kegiatan Penyusunan Program Kerja Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah			1.696.538		1.696.538	1.696.538	100	Bidang Politik dan Ormas
2.	Kegiatan Perumusan Bahan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan			1.273.291		1.273.291	1.273.291	100	Bidang Politik dan Ormas

	Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah								
3.	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah			935.690.967		935.690.967	935.690.967	100	Bidang Politik dan Ormas
4.	Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah			6.731.563		6.731.563	6.731.563	100	Bidang Politik dan Ormas
5.	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta			5.310.484		5.310.484	4,090,484	77,03	Bidang Politik dan Ormas

	Pemantauan Situasi Politik Di Daerah								
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>									
1.	Kegiatan Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			1.583.134		1.583.134	1.583.134	100	Bidang Politik dan Ormas
2.	Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			173.380.312		173.380.312	158,680,862	91,52	Bidang Politik dan Ormas
3.	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah			123.831.411		123.831.411	116,156,411	93,80	Bidang Politik dan Ormas
4.	Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala			10.088.734		10.088.734	10.088.734	100	Bidang Politik dan Ormas

	Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah								
5.	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah			6.539.076		6.539.076	6.539.076	100	Bidang Politik dan Ormas
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>									
1.	Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			1.743.213		1.743.213	1.743.213	100	Bidang Ideologi, Wawasan dan Ketahanan Bangsa
2.	Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			10.020.068		10.020.068	8,805,068	87,87	Bidang Ideologi, Wawasan dan Ketahanan Bangsa
3.	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan			67.819.329		67.819.329	67.819.329	100	Bidang Ideologi, Wawasan dan Ketahanan Bangsa

	Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah								
4.	Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			60.947.797		60.947.797	59,597,797	97,78	Bidang Ideologi, Wawasan dan Ketahanan Bangsa
5.	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			10.427.427		10.427.427	10.427.427	100	Bidang Ideologi, Wawasan dan Ketahanan Bangsa

**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**

1	Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			1.559.025		1.559.025	1.559.025	100	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
2.	Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini,			65.529.562		65.529.562	64,094,562	97,81	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

	Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah								
3.	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			400.608.704		400.608.704	382,586,204	95,50	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
4.	Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			52.265.000		52.265.000	50,150,000	95,95	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
5.	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			10.687.500		10.687.500	9,757,500	91,30	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

6.	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota			1.066.200.000		1.066.200.000	1.066.200.000	100	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
----	-------------------------------------------------------------	--	--	---------------	--	---------------	---------------	-----	----------------------------------------------------

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan sebagai berikut :

1. Dalam mengalokasikan anggaran untuk program dan kegiatan berdasarkan prioritas secara efektif, efisiensi dan dapat diukur hasilnya.
2. Pengawasan Kuasa Pengguna Anggaran dan PPTK dalam hal tertib pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.
3. Kegiatan yang bersifat rutin terdapat sisa anggaran dikarenakan penggunaannya sesuai dengan kebutuhan yang ada seperti sisa honorarium jasa pengajar/narasumber, sisa belanja makan/minum, sisa belanja modal dan sisa penggunaan biaya perjalanan dinas.

Dari table diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah secara umum efisien

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) disusun sebagai bentuk Pertanggungjawaban Kabupaten Lombok Tengah berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2022 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Bab III terhadap kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menunjukkan tingkat pencapaian sasaran - sasaran strategis yang diukur melalui pencapaian target indikator kinerja pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 - 2026 dikategorikan **memuaskan**, karena nilai capaiannya masih dalam standar penilaian skala ordinal sebagai komitmen kinerja.

Disadari bahwa selama berlangsungnya Tahun Anggaran 2022 masih ditemui beberapa permasalahan dan kendala yang belum terselesaikan dengan baik dan bisa menghambat pencapaian target capaian kinerja antara lain sebagai berikut :

1. Terbatasnya dana dari beberapa komponen yang sudah diusulkan semula
2. Masih banyaknya kalangan yang kurang memahami pentingnya eksistensi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Sumber Daya Manusia sebagai pendukung pencapaian kinerja dan peningkatan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat masih perlu peningkatan kualitas dan keterampilan manajerial yang tinggi di bidangnya
4. Peralatan pendukung administrasi dan sarana mobilitas yang memungkinkan kecepatan dan ketepatan sesuai situasi yang diperlukan

Dalam perencanaan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 – 2026 telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Target capaian indikator keberhasilan setiap sasaran telah didesain untuk meningkat setiap tahunnya. Memperhatikan target sasaran tersebut dan mempertimbangkan dinamika dan perkembangan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah, maka perlu direncanakan dan dirumuskan kegiatan – kegiatan yang inovatif dan efektif yang mengarah kepada pencapaian target dan sasaran.

Selain itu, kegiatan antar bidang seharusnya bersinergi dan saling mendukung sehingga pencapaian target dan sasaran akan lebih optimal. Pada aspek pelaksanaan, setiap kegiatan harus dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran dan tepat waktu sehingga tujuan dan sasaran kegiatan dapat dicapai dan penyerapan anggaran dapat ditingkatkan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis di era globalisasi, yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

#### B. RENCANA TINDAK LANJUT

Menyikapi berbagai permasalahan dan kendala yang masih ditemui dalam pelaksanaan tahun anggaran 2022, untuk itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dari waktu ke waktu senantiasa melakukan berbagai langkah progresif dan inovatif dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan publik, baik melalui reformasi/perubahan pada tataran birokrasi, perbaikan sistem pelayanan dan pengalokasian anggaran.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022 belum memenuhi harapan seluruh masyarakat, namun demikian segala kekurangan dan ketidak sempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2022 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022.

**Praya, 31 Desember 2022**  
**Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Kabupaten Lombok Tengah,**



**Murdi, AP, M.Si**  
**NIP. 197512311994121002**

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. DAFTAR PRESTASI / PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH SKPD TAHUN 2022
2. TABEL HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN 2022

1. DATA PRESTASI/ PENGHARGAAN

Data prestasi, penghargaan, piagam, juara, yang diperoleh secara individual, kelompok, organisasi dan daerah yang didapatkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2022 (tingkat provinsi, Nasional dan Internasional)

<b>NO</b>	<b>JENIS PRESTASI</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	-	-

**HUBUNGAN DOKUMEN PERENCANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2022**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN RPJMD</b>	<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD TAHUN 2022</b>	<b>SASARAN RENSTRA SKPD</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SKPD</b>	<b>PERJANJIAN KINERJA (PK) SKPD TAHUN 2022</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN SKPD TAHUN 2022</b>	<b>ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2022</b>
1	Meningkatnya Stabilitas Sosial Masyarakat	Ahlaqul Karimah dan Penanaman Nilai Budaya	Meningkatnya Kohesifitas Sosial	Indeks Kerukunan Beragama	Meningkatnya Kohesifitas Sosial	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	150,957,834
2	Meningkatnya Moderasi Beragama					Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	54,527,199
						Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1,596,849,791
			Meningkatnya Stabilitas Politik	Indeks Demokrasi	Meningkatnya Stabilitas Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	950,702,843
						Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	315,422,667

						Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,732,585,348
--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------	---------------

Praya, 31 Desember 2022  
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Lombok Tengah,



Murdi, AP, M.Si  
NIP. 197512311994121002